

**Dari Media ke Algoritma: Rekonfigurasi Ekosistem
Komunikasi Politik melalui Perspektif Actor–Network Theory**

*From Media to Algorithms: Reconfiguring the Ecosystem of
Political Communication through the Perspective of Actor –
Network Theory*

**Putrawan Yuliandri¹
Muhammad Prakoso Aji²
Jerry Indrawan³**

¹Program Studi Kajian Film, Televisi dan Media

^{2,3}Program Studi Ilmu Politik

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Alamat: Jalan RS Fatmawati No.1 Pondok Labu – Jakarta Selatan

¹putrawanyuliandri@upnvj.ac.id; ²prakosoaji@upnvj.ac.id;

³jerry.indrawan@upnvj.ac.id

Dikirim: 31 Januari 2026, Direvisi: 20 Juni 2026, Diterima: 21
Juni 2026, Terbit: 28 Juni 2026. Sitasi: Yuliandri, P., Aji, M. P.,
Indrawan, J. (2026). Dari Media ke Algoritma: Rekonfigurasi
Ekosistem Komunikasi Politik melalui Perspektif Actor–Network
Theory. *Promedia: Public Relation dan Media Komunikasi*,
12(1), 169-204

Abstract

This study examines the shift in political communication from mass media dominance to an algorithm driven digital ecosystem using Actor-Network Theory (ANT). Using a qualitative approach within a constructivist paradigm, it traces relationships between human and non-human actors. The findings show that algorithms function as actants and mediators that shape visibility and meaning based on engagement logic. The processes of translation and black-boxing indicate that political information is reshaped within opaque systems, while political reality emerges through issue amplification in digital spaces. Algorithms play a key role in reconfiguring the contemporary political communication ecosystem.

Keywords: *Actor-Network Theory; Algorithms; Digital Political Communication; Media; Political Communication Ecosystem*

Abstraksi

Penelitian ini menganalisis pergeseran komunikasi politik dari dominasi media massa ke ekosistem digital berbasis algoritma dengan perspektif *Actor-Network Theory* (ANT). Melalui pendekatan kualitatif dalam paradigma konstruktivis, penelitian ini menelusuri relasi aktor manusia dan non-manusia. Hasil menunjukkan bahwa algoritma berperan sebagai *actant* dan mediator yang membentuk visibilitas serta makna pesan politik berdasarkan logika keterlibatan dalam proses komunikasi. Proses *translation* dan *black-boxing* menunjukkan bahwa informasi politik berubah dalam sistem yang tidak sepenuhnya transparan, sementara realitas politik terbentuk melalui penguatan isu di ruang digital. Algoritma berperan penting dalam merekonfigurasi ekosistem komunikasi politik kontemporer.

Kata Kunci: *Actor-Network Theory; Algoritma; Ekosistem Komunikasi Politik; Komunikasi Politik Digital; Media*

I. PENDAHULUAN

Kajian komunikasi politik klasik, secara dominan menempatkan media massa sebagai pusat produksi dan distribusi realitas politik melalui mekanisme seleksi, penekanan, dan pembingkaihan isu. Dalam kerangka *agenda-setting* (McCombs & Shaw, 1972: 177), media dipahami memiliki kemampuan untuk menentukan isu yang dianggap penting oleh publik, sementara melalui *framing* (Entman, 1993: 52), media membentuk cara publik memahami dan mengevaluasi realitas politik. Perspektif ini menempatkan komunikasi politik sebagai proses representasional yang dikendalikan oleh aktor manusia, khususnya institusi media dan jurnalis, yang berfungsi sebagai penjaga gerbang informasi (*gatekeeper*) sekaligus pada saat yang sama membentuk realitas politik (McNair (2017: 12). Pendekatan ini kemudian diperluas dalam teori demokrasi deliberatif (Habermas, 2006) yang menekankan peran media sebagai ruang

publik normatif bagi pertukaran argumen rasional yang inklusif serta imparisial yakni, independen, bebas dari dominasi atau kekuasaan.

Namun, perkembangan teknologi digital telah mengubah kondisi dan menantang perspektif klasik komunikasi politik tersebut. Dalam latar kontemporer, komunikasi politik tidak lagi berjalan satu arah dari media ke publik (*one to many*), tetapi menjadi lebih terbuka dan saling terhubung dari banyak orang ke banyak orang lainnya (*many to many*). Publik kini tidak hanya menerima informasi politik, tetapi ikut serta dalam membuat, menyebarkan, dan menafsirkan konten politik.

Situasi ini semakin kuat dengan hadirnya platform digital yang menyediakan tempat berkomunikasi sekaligus pada saat yang sama juga mengatur bagaimana informasi muncul dan menyebar melalui algoritma. Menurut Gillespie (2014: 168), algoritma adalah serangkaian instruksi atau aturan yang dirancang untuk memproses data dan menghasilkan keluaran tertentu. Algoritma bekerja secara otomatis melalui pemrograman komputer untuk mengolah data pengguna untuk menentukan bagaimana informasi disusun, diprioritaskan, dan ditampilkan. Artinya, apa yang dilihat oleh publik di ruang digital tidak sepenuhnya ditentukan oleh manusia semata, melainkan oleh cara kerja sistem teknologi digital.

Perkembangan ini mendorong munculnya kajian tentang peran algoritma dalam ranah komunikasi politik. Eli Pariser (2011: 9) menjelaskan bagaimana algoritma menciptakan *filter bubble* yang membatasi informasi yang diterima pengguna. Cass Sunstein (2001: 65) menunjukkan bahwa lingkungan digital mendorong terbentuknya *echo chamber* yang memperkuat pandangan yang sudah ada sehingga ujungnya adalah polarisasi politik. Zeynep Tufekci (2015: 206) menemukan bahwa algoritma media sosial memengaruhi visibilitas konten politik dan berpotensi membentuk preferensi publik. Tarleton Gillespie (2014: 168) juga menegaskan bahwa algoritma berperan dalam menentukan relevansi informasi dalam ruang publik digital. Selain itu, Philip M. Napoli (2014: 345) menunjukkan bahwa distribusi informasi di era digital semakin bergantung pada sistem

kurasi algoritmik. Sehingga algoritma menjadi variabel eksternal yang determinan dalam komunikasi politik dalam ranah digital.

Merlyna Lim (2017) dalam artikel "*Freedom to Hate: Social Media, Algorithmic Enclaves, and the Rise of Tribal Nationalism in Indonesia*" menganalisis bagaimana media sosial berperan dalam meningkatnya polarisasi politik dan menguatnya nasionalisme berbasis identitas di Indonesia, dengan studi kasus Pemilihan Gubernur DKI Jakarta pada 2017. Lim menjelaskan bahwa algoritma media sosial membentuk *algorithmic enclaves*, yaitu ruang-ruang informasi yang membuat pengguna cenderung terpapar pada pandangan yang sejalan dengan keyakinannya sendiri, sehingga memperkuat *echo chamber* dan memperdalam segregasi opini. Dalam situasi seperti ini, kebebasan berekspresi di media sosial bertransformasi menjadi "*freedom to hate*," yakni kebebasan untuk menyebarkan ujaran kebencian dan memperkuat konflik identitas. Lim menyimpulkan bahwa interaksi antara algoritma platform dan praktik pengguna menghasilkan polarisasi politik yang kuat serta mendorong munculnya *tribal nationalism*, yaitu nasionalisme eksklusif yang berbasis kelompok agama atau identitas tertentu hal ini tentu saja berpotensi melemahkan kohesi demokrasi.

Meskipun berbagai literatur di atas telah memberikan kontribusi penting dalam menjelaskan dinamika komunikasi politik dalam konteks digital, sebagian besar kajian masih memposisikan algoritma sebagai faktor di luar proses komunikasi itu sendiri. Algoritma dipahami sebatas alat teknis atau variabel eksternal yang memengaruhi bagaimana informasi disebar, tanpa melihat keterlibatannya secara langsung dalam pembentukan makna dan ekosistem komunikasi politik.

Pendekatan ini cenderung memisahkan antara aktor manusia sebagai pelaku komunikasi dan teknologi sebagai instrumen pendukung. Akibatnya, peran algoritma sering hanya dijelaskan dalam konteks efek atau dampak, seperti penyebaran informasi, personalisasi konten, atau polarisasi opini. Padahal, dalam praktik komunikasi digital, algoritma tidak sebatas mempengaruhi, namun ikut membentuk struktur interaksi, menentukan visibilitas pesan, serta mengarahkan alur komunikasi secara aktif. Artinya,

algoritma bekerja di dalam proses komunikasi, bukan di luar proses tersebut. Oleh karena itu, melihat algoritma hanya sebagai variabel eksternal berpotensi menyederhanakan kompleksitas komunikasi politik dalam ranah digital yang sesungguhnya bersifat relasional dan terdistribusi.

Keterbatasan tersebut menunjukkan perlunya kerangka teoretis yang mampu melampaui dikotomi antara manusia dan teknologi dalam memahami lanskap komunikasi politik kontemporer. Dalam hal ini, *Actor Network Theory* (ANT) (Callon, 1986; Latour, 2005; Law, 2009) menawarkan perspektif yang relevan dengan menempatkan manusia dan non-manusia dalam posisi yang setara sebagai bagian dari jaringan relasional. ANT yang dikembangkan oleh Bruno Latour, Michel Callon, dan John Law menolak pemisahan antara manusia dan teknologi. Semua entitas dianggap sebagai *actant* dalam jaringan. Sebagaimana dijelaskan oleh Latour (2005: 71) *actant* merupakan entitas baik manusia maupun non-manusia yang memiliki kapasitas untuk bertindak dan memengaruhi jalannya suatu jaringan relasi. Berbeda dengan konsep “aktor” dalam pengertian tradisional yang biasanya hanya merujuk pada manusia, *actant* mencakup elemen yang lebih luas, seperti teknologi, algoritma, dokumen, hingga infrastruktur. Sehingga realitas sosial adalah hasil dari jaringan hubungan. Tidak ada aktor tunggal dalam proses sosial. Semua saling mempengaruhi. Hal ini sangat relevan dengan komunikasi politik digital di mana algoritma menjadi bagian dari jaringan tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah penelitian ini akan menganalisis secara mendalam tentang bagaimana pergeseran dari dominasi media menuju peran algoritma yang merekonfigurasi ekosistem komunikasi politik digital, serta bagaimana algoritma beroperasi sebagai *actant* dalam jaringan tersebut? Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana perubahan dari model komunikasi politik berbasis media ke model berbasis algoritma membentuk ulang relasi antara aktor manusia dan non-manusia, dengan menggunakan perspektif ANT. Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya untuk menjelaskan rekonfigurasi ekosistem komunikasi politik yang

menjelakan adanya perubahan saluran atau teknologi, sehingga menyebabkan terjadinya pergeseran dalam bentuk baru yang menempatkan algoritma sebagai elemen konstitutif dalam produksi, distribusi, dan artikulasi makna politik dalam ekosistem digital.

II. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma konstruktivis yang memandang realitas komunikasi politik digital sebagai hasil dari proses pembentukan makna melalui interaksi sosial dalam masyarakat (Berger & Luckmann, 2011). Dalam lingkungan media digital, realitas politik berkembang melalui praktik komunikasi yang berlangsung dalam jaringan media yang saling terhubung dan membentuk pengalaman sosial berbasis media (Couldry & Hepp, 2017). Infrastruktur digital seperti platform, algoritma, dan data mempengaruhi bagaimana informasi politik diprioritaskan, ditampilkan, dan disebarkan kepada pengguna (van Dijck, Poell, & de Waal, 2018). Dalam konteks ini, realitas politik dipahami sebagai hasil dari proses interaksi yang melibatkan manusia dan non-manusia.

Secara metodologis, penelitian ini menggunakan pendekatan *Actor-Network Theory* sebagaimana dikembangkan oleh Bruno Latour (2005), Michel Callon (1986), dan John Law (2009), yang menekankan pentingnya menelusuri jejak (*tracing*) relasi antara berbagai *actant* dalam jaringan.

Unit analisis dalam penelitian ini adalah jaringan komunikasi politik digital yang melibatkan interaksi antara aktor manusia (seperti pengguna, *influencer* politik, dan institusi media) dan non-manusia (seperti algoritma, platform, dan konten digital). Dalam kerangka ANT, semua entitas tersebut diperlakukan sebagai *actant* yang memiliki kapasitas untuk memengaruhi jalannya komunikasi. Oleh karena itu, penelitian ini tidak membedakan secara hierarkis antara manusia dan teknologi, melainkan menganalisis bagaimana relasi di antara keduanya membentuk realitas politik.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa metode yang saling melengkapi. Pertama, observasi digital digunakan untuk mengamati bagaimana konten politik diproduksi, didistribusikan, dan dikonsumsi dalam platform digital tertentu. Observasi ini mencakup analisis terhadap beragam fitur yang disediakan oleh platform digital seperti YouTube maupun X, serta interaksi pengguna dengan konten politik. Kedua, analisis dokumen dilakukan terhadap kebijakan platform, pedoman komunitas, serta literatur terkait algoritma untuk memahami logika operasional sistem yang mengatur distribusi informasi. Pendekatan ini memungkinkan triangulasi data untuk meningkatkan validitas temuan.

Lebih jelasnya, penelitian ini menggunakan teknik observasi digital dengan memanfaatkan fitur pencarian bawaan (*search feature*) pada platform X dan YouTube untuk menelusuri unggahan, komentar, *retweet*, *quote tweet*, *likes*, tayangan, serta rekomendasi konten yang berkaitan dengan isu politik yang diamati. Data dikumpulkan melalui dokumentasi digital berupa tangkapan layar (*screenshot*), pencatatan metadata interaksi (jumlah *likes*, *retweet*, komentar, *views*), serta penelusuran arsip percakapan yang tersedia secara publik. Untuk memvisualisasikan hubungan antar aktor dalam jaringan komunikasi politik, peneliti menggunakan Mermaid Chart untuk membuat pemetaan jaringan (*network mapping*) menggunakan aplikasi google colab berbasis pemrograman Phyton untuk visualisasi data.

Adapun *tools* utama penelitian terdiri atas: (1) platform X sebagai sumber *digital trace data* (DTD), (2) platform YouTube sebagai sumber *digital trace data*, (3) *screenshot* dan dokumentasi digital sebagai instrumen pengumpulan data, serta (4) Mermaid Chart untuk visualisasi jaringan komunikasi. Pendekatan ini sejalan dengan metode *digital trace data* yang memanfaatkan jejak aktivitas pengguna pada platform digital sebagai sumber data penelitian. Sebagaimana dijelaskan oleh Ohme et al. (2024), penggunaan data jejak digital semacam ini sangat krusial untuk menangkap dinamika pesan tekstual maupun audiovisual serta melacak lintasan aktivitas pengguna secara

granular pada tingkat individu yang sebelumnya sulit diakses oleh metode penelitian komunikasi tradisional.

Penelitian ini dibatasi pada observasi jaringan komunikasi politik digital yang berlangsung pada platform X dan YouTube selama periode Februari–Maret 2026. Pemilihan periode tersebut didasarkan pada pertimbangan metodologis dan teoritis bahwa penelitian ini berupaya mengamati proses pembentukan jaringan komunikasi politik pada saat isu politik sedang berada dalam fase intensitas percakapan yang tinggi (*high-attention cycle*). Dalam rentang waktu tersebut muncul beberapa isu yang memperoleh visibilitas signifikan di ruang publik digital Indonesia, sehingga memungkinkan peneliti mengamati secara langsung proses interaksi antara pengguna, konten, platform, dan algoritma sebagaimana dijelaskan dalam Actor-Network Theory (ANT).

Fokus penelitian diarahkan pada dua kasus utama, yaitu diskursus mengenai Board of Peace (BOP) yang berkembang melalui unggahan akun @DinoPattiDjalal serta diskursus mengenai program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang berkembang melalui unggahan media internasional seperti bloomberg, akun influencer @menuembegejelek, dan sistem rekomendasi platform. Pemilihan kedua kasus tersebut dilakukan secara *purposive* karena keduanya merepresentasikan dua karakteristik isu politik yang berbeda. Isu BOP merepresentasikan komunikasi politik yang berhubungan dengan kebijakan luar negeri dan geopolitik internasional, sedangkan isu MBG merepresentasikan komunikasi politik yang berkaitan dengan kebijakan domestik dan pelayanan publik. Melalui pemilihan dua isu yang berbeda karakter tersebut, peneliti dapat mengamati bagaimana jaringan komunikasi politik digital terbentuk dan bekerja pada konteks yang berbeda, namun melalui mekanisme platform dan algoritma yang relatif serupa.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan prinsip utama dalam ANT, yaitu *tracing the network*. Proses ini melibatkan beberapa tahap. Pertama, identifikasi *actant* yang terlibat dalam jaringan komunikasi, baik manusia maupun non-manusia. Kedua, pemetaan relasi antara *actant* tersebut untuk melihat bagaimana mereka saling berinteraksi dan memengaruhi satu sama lain.

Ketiga, analisis proses *translation* untuk memahami bagaimana makna dan kepentingan ditransformasikan dalam jaringan. Dalam konteks ini, *translation* mencakup proses bagaimana algoritma mengubah, menyaring, dan memprioritaskan informasi politik. Keempat, analisis terhadap peran mediator, yaitu entitas yang tidak hanya menyampaikan informasi, namun juga ikut terlibat mentransformasikannya.

Untuk memperkuat analisis, penelitian ini juga menggunakan konsep *black-boxing* dalam ANT, yaitu proses di mana suatu sistem menjadi tidak transparan karena kompleksitas internalnya (Latour, 2005). Dalam konteks ini, algoritma dipahami sebagai *black box* yang perlu dibuka melalui analisis terhadap output dan dampaknya terhadap komunikasi politik. Penelitian ini tidak berusaha mengakses kode algoritma secara langsung, tetapi menganalisis bagaimana algoritma bekerja melalui efek yang dihasilkannya dalam jaringan komunikasi.

III. PEMBAHASAN

Pembahasan penelitian ini dikembangkan melalui langkah operasional yang sistematis dalam menelusuri (*tracing*) jaringan komunikasi politik digital. Operasionalisasi ini bertujuan untuk menerjemahkan konsep-konsep kunci seperti *actant*, jaringan (*network*), *translation*, mediator, *black-boxing*, dan stabilisasi ke dalam prosedur analisis empiris yang terstruktur dan dapat ditelusuri secara jelas, gambaran lengkapnya lihat pada tabel 1 matriks analisis data.

Tahap pertama dalam analisis ini adalah identifikasi *actant*, yaitu menginventarisasi seluruh entitas yang terlibat dalam komunikasi politik digital tanpa membedakan secara awal antara manusia dan non-manusia. Prinsip utama yang digunakan mengacu pada pemikiran Bruno Latour (2005) bahwa setiap entitas yang “membuat perbedaan” dalam suatu situasi harus dipertimbangkan sebagai bagian dari jaringan. Oleh karena itu, proses identifikasi dilakukan secara terbuka, eksploratif, dan berbasis data empiris. Tahap ini penting untuk memastikan bahwa analisis tidak terjebak pada asumsi awal tentang siapa

yang dianggap sebagai aktor utama dalam komunikasi politik digital.

Tabel 1. Matriks Analisis Data

Tahap ANT	Fokus Analisis	Pertanyaan Kunci	Data yang Dianalisis
Identifikasi <i>Actant</i>	Siapa/ apa yang terlibat	Siapa saja aktor dalam komunikasi politik digital	Akun, platform, algoritma, konten
Pemetaan Jaringan	Relasi antar aktor	Bagaimana hubungan antar <i>actant</i> terbentuk?	Interaksi, share, komentar
<i>Translation</i>	Transformasi makna	Bagaimana informasi politik berubah	Konten viral, framing isu
Mediator vs <i>intermediary</i>	Peran aktor	Apakah algoritma mengubah makna	<i>Feed</i> , rekomendasi
<i>Black-boxing</i>	Ketertutupan sistem	Bagaimana algoritma menyembunyikan prosesnya?	<i>Output platform</i>
Stabilisasi	Pembentukan realitas	Bagaimana narasi politik menjadi dominan?	Trending, diskursus publik

Sumber: Peneliti

Tahap kedua adalah pemetaan jaringan (*network mapping*), yang berfokus pada relasi antar *actant* dan bagaimana hubungan tersebut membentuk struktur komunikasi politik. Pada tahap ini, penelitian menelusuri bagaimana konten politik diproduksi, didistribusikan, dan diterima dalam platform digital, serta bagaimana algoritma berinteraksi dengan pengguna dalam menentukan visibilitas informasi. Relasi ini tidak dipahami sebagai hubungan linear, melainkan sebagai interaksi dinamis dan timbal balik yang dimediasi oleh teknologi.

Selanjutnya, pada tahap ketiga, analisis *translation* menjadi inti dari tahap ini, dengan merujuk pada Callon (1986) yang

menjelaskan bahwa makna, kepentingan, dan identitas mengalami transformasi melalui interaksi dalam jaringan. Dalam konteks ini, algoritma berperan dalam mengubah informasi politik melalui proses kurasi, personalisasi, dan prioritasasi konten, sehingga isu tertentu dapat menjadi viral, diperkuat, atau justru terpinggirkan dalam diskursus publik.

Tahap keempat, mencakup analisis peran *mediator* dan *intermediary*. Mengacu pada Latour (2005), penelitian ini memposisikan algoritma sebagai *mediator* karena tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga mentransformasi makna dan struktur visibilitasnya. Kemudian, pada tahap kelima, konsep *black-boxing* digunakan untuk memahami bagaimana sistem algoritmik menjadi tidak transparan dan diterima sebagai sesuatu yang “*given*”, meskipun proses internalnya kompleks dan tersembunyi.

Tahap akhir adalah stabilisasi jaringan, yaitu mengidentifikasi bagaimana relasi antar *actant* menjadi relatif stabil dalam membentuk realitas politik tertentu. Pada tahap ini, penelitian menganalisis bagaimana narasi politik menjadi dominan, bagaimana opini publik terbentuk, serta bagaimana kekuasaan bekerja dalam mempertahankan struktur komunikasi dalam ekosistem digital.

A. Identifikasi *Actant* dalam ekosistem Komunikasi Politik Digital

Actant merujuk pada setiap entitas yang dapat mempengaruhi jalannya tindakan dalam suatu jaringan, baik manusia maupun non-manusia. Bagi Latour (2005) tindakan sosial terbentuk dari hubungan berbagai elemen yang saling terhubung, sehingga agensi tidak hanya dimiliki manusia, tetapi muncul dari interaksi dalam jaringan tersebut. Pandangan ini diperkuat oleh Callon (1986; 2001) yang menunjukkan bahwa objek teknis dapat mengarahkan tindakan aktor lain, karena teknologi dan perangkat ikut membentuk proses interaksi sosial. Law (1992) juga menegaskan bahwa tindakan sosial merupakan hasil hubungan heterogen antara manusia dan teknologi yang bekerja bersama dalam jaringan. Dalam kerangka ini, identifikasi *actant* dilakukan

secara terbuka dengan mengikuti prinsip bahwa setiap entitas yang “membuat perbedaan” dalam alur komunikasi harus diakui sebagai bagian dari jaringan (Latour, 2005: 71).

Hasil identifikasi *actant* dalam penelitian ini memperlihatkan (lihat matriks pada tabel 2) bahwa komunikasi politik digital tidak lagi dapat dipahami sebagai interaksi yang hanya melibatkan aktor manusia. Hasil observasi empiris menunjukkan bahwa berbagai entitas baik manusia maupun non-manusia secara simultan terlibat dalam produksi, distribusi, dan sirkulasi pesan politik.

Pertama, akun pengguna, baik yang dimiliki oleh politisi, media, maupun individu, berfungsi sebagai titik awal produksi sekaligus distribusi pesan. Namun, peran ini tidak berdiri sendiri karena keberadaannya selalu terhubung dengan elemen lain dalam ekosistem digital.

Tabel 2. *Actant* dalam Ekosistem Komunikasi Politik Digital.

<i>Actant</i>	Peran Utama	Fungsi dalam Jaringan
Akun (<i>User/ Politisi/ Influencer</i>)	Produsen & distributor	Membuat dan menyebarkan pesan
Platform	Infrastruktur	Mengatur ruang interaksi
Algoritma	Mediator	Menentukan visibilitas
Konten	Pemicu	Menghasilkan interaksi
Interaksi	Data	Menggerakkan distribusi

Sumber: Peneliti

Kedua, *actant* platform digital menyediakan ruang interaksi juga bertindak sebagai struktur yang mengorganisasi hubungan antar *actant*. Platform seperti YouTube atau Twitter /X membentuk lingkungan komunikasi melalui fitur-fitur yang mengatur bagaimana konten dapat diakses, disebar, dan direspons (Burgess & Green, 2018; Tufekci 2017). Artinya, platform berfungsi sebagai *actant* yang memiliki kapasitas untuk

memengaruhi jalannya komunikasi politik. Hal ini sejalan dengan argumen bahwa platform digital merupakan infrastruktur sosial yang aktif dalam membentuk praktik komunikasi (van Dijck, Poell, & de Waal, 2018: 2). Dalam praktiknya, platform menentukan batasan sekaligus peluang bagi aktor lain dalam jaringan.

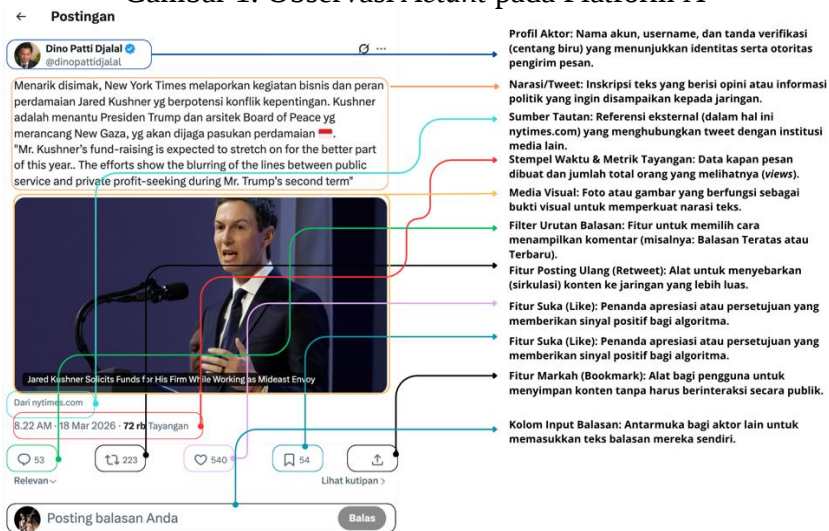
Selain platform, algoritma muncul sebagai *actant* yang memiliki peran signifikan dalam menentukan visibilitas konten politik. Algoritma bekerja sebagai mekanisme teknis sekaligus sebagai sistem yang secara aktif mengkurasi informasi berdasarkan data perilaku pengguna. Proses ini mempengaruhi konten mana yang muncul, seberapa sering konten tersebut ditampilkan, dan kepada siapa konten tersebut didistribusikan. Studi menunjukkan bahwa algoritma berfungsi sebagai penentu relevansi publik dengan menyaring dan memprioritaskan informasi tertentu (Gillespie, 2014). Algoritma memiliki kapasitas untuk membentuk struktur eksposur informasi dalam komunikasi politik digital.

Konten politik itu sendiri juga berperan sebagai *actant* yang tidak pasif dalam jaringan. Konten tidak dapat dimaknai sebatas objek yang disampaikan, namun juga memiliki karakteristik yang memengaruhi bagaimana ia beredar dan diterima. Format visual, narasi, serta muatan emosional dalam konten politik dapat memicu respons pengguna dan meningkatkan peluang distribusi melalui sistem algoritmik. Dalam konteks ini, interaksi antara konten dan pengguna menjadi bagian penting dalam menentukan dinamika jaringan komunikasi. Hal ini memperjelas bahwa konten berfungsi sebagai elemen yang menghubungkan berbagai *actant* dalam jaringan secara simultan.

Pengguna sebagai aktor manusia melengkapi jaringan dengan memberikan respons yang secara langsung memengaruhi pergerakan konten dalam platform. Tindakan seperti memberikan *like*, komentar, atau membagikan konten menjadi data yang digunakan oleh algoritma untuk menentukan distribusi selanjutnya. Interaksi ini mencerminkan preferensi individu sekaligus menjadi mekanisme kolektif yang membentuk pola komunikasi politik secara lebih luas. Pengguna memiliki peran

ganda di satu sisi sebagai penerima pesan, di sisi lain sebagai bagian dari sistem yang menggerakkan sirkulasi informasi. relasi antara pengguna dan algoritma bersifat timbal balik dan terus berkembang, untuk memperjelas uraian ini penulis memberikan ilustrasi sebagai hasil observasi identifikasi *actant* pada postingan isu politik global dalam Gambar 1.

Gambar 1. Observasi *Actant* pada Platform X



Sumber: Postingan @Dinnopattidjalal di Platform X pada 18 Maret 2026

Hasil observasi pada gambar 1 menunjukkan bahwa unggahan Dino Patti Djalal di platform X mengenai isu Board of Peace (BOP) memicu terbentuknya jaringan komunikasi politik digital yang berkembang cepat. Unggahan tersebut muncul

setelah penyerangan Israel dan Amerika Serikat pada Sabtu, 28 Februari 2026, di mana isu ini sedang menjadi perhatian publik di Indonesia. Dino Patti Djalal mengemas isu kebijakan luar negeri Indonesia ke dalam narasi singkat dan menyertakan tautan berita internasional (www.nytimes.com) sebagai rujukan, sehingga konten segera memperoleh perhatian awal dari pengguna. Setelah diunggah, pada 18 Maret 2026 interaksi berupa 223 *retweet* dan 540 *likes* meningkat, lalu algoritma platform memperluas jangkauan konten ke linimasa pengguna yang lebih luas. Dalam tahap berikutnya, *influencer* dan pengguna lain merespons melalui *quote tweet* dan komentar dengan membawa perspektif lokal, mulai dari isu geopolitik, kepentingan ekonomi, hingga sentimen ideologis. Percakapan berkembang di kolom komentar dan menghasilkan akumulasi interaksi yang meningkatkan visibilitas unggahan. Algoritma kembali memprioritaskan konten tersebut berdasarkan data keterlibatan, sehingga diskusi meluas dan memunculkan berbagai interpretasi baru. Situasi ini menunjukkan bahwa platform X mengorganisasi hubungan antar aktor melalui fitur interaksi dan metrik visibilitas, sementara isu yang awalnya berupa narasi diplomatik berubah menjadi perdebatan politik publik yang melibatkan pengguna, *influencer*, dan jaringan diskusi yang lebih luas. Observasi ini mengidentifikasi tokoh publik, pengguna, *influencer*, algoritma, dan platform sebagai aktor yang saling berinteraksi, di mana unggahan awal memicu respons publik, diperluas oleh algoritma, lalu membentuk diskusi politik yang berkembang melalui pertukaran komentar dan distribusi ulang konten (lihat gambar 2).

Gambar 2. Ragam Komentar dalam Unggahan



Sumber: Postingan @Dinnopattidjalal di Platform X pada 18
Maret 2026 diakses ulang oleh peneliti pada 28 Maret 2026

Bukti keterhubungan antar-aktor juga terlihat dari berbagai elemen yang terdapat dalam unggahan tersebut. Gambar 1 menunjukkan bahwa pesan politik terdiri atas teks yang ditulis oleh pengunggah, serta terhubung dengan media visual, tautan berita eksternal, fitur distribusi ulang (*retweet*), fitur apresiasi (*like*), fitur penyimpanan (*bookmark*), serta ruang percakapan melalui kolom komentar. Setiap elemen tersebut menghasilkan jejak interaksi yang dapat diamati secara langsung. Pada saat observasi dilakukan, unggahan telah memperoleh sekitar 72 ribu tayangan, 223 retweet, 540 likes, 53 komentar, dan 54 bookmark. Data ini menunjukkan bahwa konten tidak berhenti pada proses publikasi oleh akun awal, namun terus bergerak melalui berbagai bentuk respons pengguna. Semakin tinggi tingkat interaksi yang diterima, semakin besar peluang konten memperoleh visibilitas yang lebih luas dalam platform.

Data observasi memperlihatkan bahwa penyebaran informasi politik berlangsung melalui hubungan yang melibatkan akun pengunggah, pengguna lain, fitur platform, dan mekanisme algoritmik yang bekerja secara bersamaan. Dalam konteks ini, algoritma berfungsi dengan memproses berbagai sinyal keterlibatan (*engagement signals*) yang dihasilkan pengguna, seperti jumlah tayangan, likes, retweet, komentar, dan bookmark. Ketika sebuah unggahan memperoleh respons yang relatif tinggi dalam waktu tertentu, sistem platform mengidentifikasinya sebagai konten yang relevan atau menarik bagi pengguna lain. Berdasarkan data tersebut, algoritma kemudian meningkatkan visibilitas unggahan dengan menampilkannya pada linimasa pengguna yang memiliki karakteristik atau minat yang serupa. Akibatnya, konten menjangkau pengikut akun pengunggah, dan juga dapat muncul pada jaringan pengguna yang lebih luas melalui rekomendasi sistem. Proses ini menciptakan siklus yang bersifat timbal balik, di mana interaksi pengguna menghasilkan data bagi algoritma, sementara keputusan algoritma menentukan peluang suatu konten untuk memperoleh interaksi berikutnya. Dapat disimpulkan algoritma memiliki peran dan fungsi sebagai saluran distribusi informasi sekaligus sebagai mediator yang secara aktif mempengaruhi jangkauan, keterlihatan (visibilitas), dan peredaran pesan politik dalam platform digital.

Berdasarkan temuan tersebut, dapat dipahami bahwa *actant* dalam ranah komunikasi politik digital terbentuk melalui jaringan kompleks yang melibatkan akun, platform, algoritma, dan konten sebagai entitas yang saling berinteraksi. Tidak ada satu aktor yang secara dominan mengendalikan proses komunikasi, melainkan seluruh elemen bekerja secara relasional dalam membentuk alur informasi. Hal ini memperlihatkan bahwa batas antara aktor manusia dan non-manusia menjadi kabur dalam praktik komunikasi digital. Setiap *actant* memiliki kontribusi dalam menentukan bagaimana pesan politik diproduksi, didistribusikan, dan dimaknai. Temuan ini sejalan dengan konsep konsep *convergence culture* sebagaimana yang dijelaskan oleh Jenkins (2006), bahwa konvergensi media yang bersifat teknologis, menggeser relasi kekuasaan antara produsen dan

konsumen, serta menempatkan pengguna (*audiens*) menjadi partisipan aktif dalam sirkulasi makna. Konten politik yang sebelumnya diproduksi oleh media atau aktor politik formal, kini secara simultan dapat diperbanyak, dimodifikasi, dan disebarluaskan kembali dalam waktu singkat karena platform digital memiliki karakteristik *user-generated content* atau konten yang dapat dibuat sendiri oleh pengguna platform bukan hanya oleh institusi media.

B. Pemetaan Jaringan: Relasi Antar *Actant* dalam Komunikasi Politik

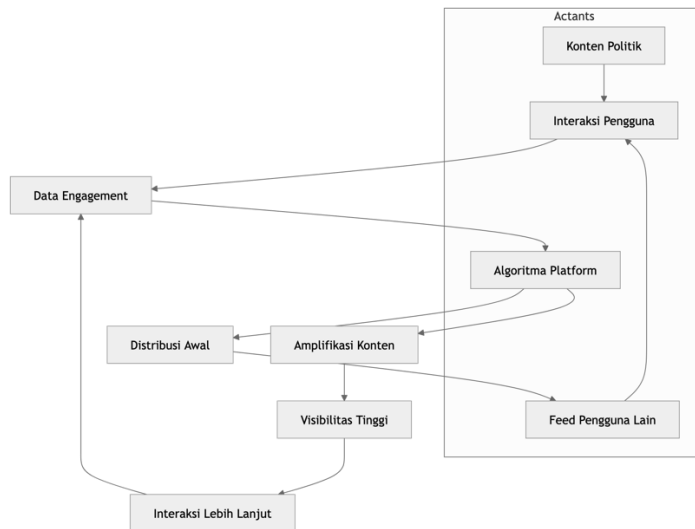
Tahap kedua dalam analisis ini berfokus pada upaya memetakan relasi antar *actant* dalam jaringan komunikasi politik digital. Pada tahap ini, perhatian tidak lagi diarahkan pada siapa saja yang terlibat, melainkan bagaimana keterhubungan di antara mereka terbentuk dan berlangsung. Dalam kerangka ANT, relasi menjadi kunci karena tindakan sosial tidak pernah berasal dari satu entitas tunggal, melainkan merupakan efek dari jaringan hubungan yang saling terkait (Latour, 2005: 63; Law, 2009: 145). Oleh karena itu, memetakan jaringan tidak semata-mata hanya mengidentifikasi aktor, namun menelusuri bagaimana relasi tersebut bekerja dan menghasilkan efek tertentu dalam komunikasi. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa relasi dalam ekosistem digital tidak bersifat tetap atau linier, tetapi bergerak secara dinamis mengikuti pola interaksi yang terus berubah. Tindakan seperti *like*, *share*, komentar, dan *retweet* memiliki peran penting sebagai penghubung antar entitas dalam jaringan. Interaksi tersebut bukan sekadar respons individual, melainkan bagian dari mekanisme yang memungkinkan suatu konten bergerak dari satu pengguna ke pengguna lain dalam skala yang lebih luas, sebagaimana juga ditegaskan dalam studi jaringan digital oleh Borgatti et al. (2009: 894) bahwa hubungan antar *node* menentukan aliran informasi dalam suatu sistem.

Dalam praktiknya, hubungan antar *actant* tidak terjadi secara kebetulan, melainkan difasilitasi oleh sistem platform yang mengatur alur distribusi informasi. Ketika sebuah konten politik mendapatkan respons tinggi dalam waktu singkat, sistem

platform cenderung membaca hal tersebut sebagai sinyal relevansi dan kepentingan publik. Akibatnya, konten tersebut akan lebih sering dimunculkan dalam *feed* pengguna lain, bahkan di luar jaringan awalnya. Fenomena ini menciptakan efek amplifikasi, di mana visibilitas konten meningkat secara eksponensial seiring bertambahnya interaksi. Studi tentang distribusi konten digital menunjukkan bahwa algoritma platform bekerja dengan mengoptimalkan probabilitas keterlibatan pengguna, sehingga konten yang interaktif akan terus diperkuat dalam sistem (Klinger & Svensson, 2015: 1248; Napoli, 2019: 42). Dengan kata lain, relasi antar pengguna dan konten tidak berdiri sendiri, tetapi selalu dimediasi oleh sistem yang secara aktif mengatur pertemuan antara keduanya.

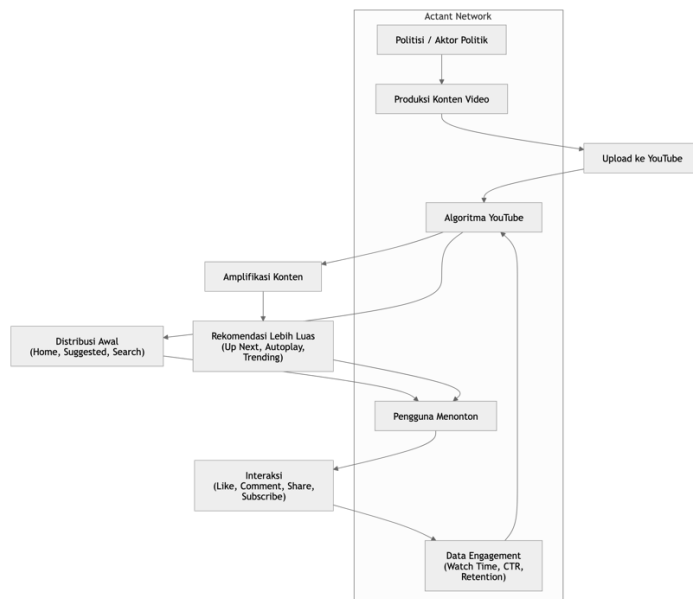
Sebagai ilustrasi peneliti menggunakan *mermaid flow chart* untuk memetakan pola antar aktor pada dua platform yang berbeda, pertama X dan kedua YouTube. Hal ini dilakukan agar pemahaman mengenai temuan ini menjadi lebih jelas sehingga dapat terlihat bahwa jaringan komunikasi politik tidak hanya terbentuk dari interaksi manusia, tetapi juga dari intervensi teknologi yang mengatur ritme dan arah distribusi informasi. Pola ini dapat dilihat pada gambar 3 dan gambar 4. Observasi terhadap platform X dan YouTube ini tidak bermaksud untuk melakukan komparasi atas keduanya, melainkan untuk menunjukkan bagaimana masing-masing platform berfungsi sebagai *actant* yang membentuk pola relasi dalam jaringan (*network*).

Gambar 3. Pola Jaringan *Actant* dalam Platform X



Sumber: Olah data Peneliti Menggunakan *Mermaid Chart*

Gambar 4. Pola Jaringan *Actant* dalam Platform YouTube



Sumber: Olah data Peneliti Menggunakan *Mermaid Chart*

Temuan ini menunjukkan bahwa relasi dalam jaringan komunikasi politik digital tidak sepenuhnya netral. Ada logika tertentu yang bekerja di balik bagaimana hubungan itu terbentuk dan berkembang, yaitu logika algoritmik yang mengutamakan keterlibatan (*engagement*). Platform cenderung memprioritaskan konten yang memicu respons pengguna karena dianggap mampu mempertahankan perhatian dan aktivitas dalam sistem, yang pada akhirnya berkaitan dengan model bisnis berbasis data (Srnicek, 2017: 48). Dalam konteks ini, relasi antar *actant* tidak hanya dipengaruhi oleh kepentingan manusia, tetapi juga oleh cara kerja teknologi yang mengolah data interaksi. Hal ini sejalan dengan argumen Tarleton Gillespie (2014: 168) yang menyatakan bahwa algoritma berperan dalam menentukan apa yang dianggap relevan untuk publik, serta José van Dijck (2018: 2) yang menegaskan bahwa platform mengorganisasi interaksi sosial melalui mekanisme berbasis data. Selain itu, studi oleh Bucher (2018: 75) menunjukkan bahwa pengalaman pengguna dalam melihat konten sebenarnya merupakan hasil konstruksi algoritmik yang tidak sepenuhnya disadari oleh pengguna itu sendiri. Hal ini menegaskan bahwa relasi dalam jaringan digital bersifat terstruktur oleh sistem yang bekerja di balik layar.

Lebih jauh, studi dokumen terhadap kebijakan platform memperlihatkan bahwa distribusi konten memang dirancang untuk mengikuti probabilitas interaksi pengguna (Covington, Adams, & Sargin, 2016; Tufekci, 2017). Artinya, semakin besar peluang sebuah konten untuk direspons, semakin besar pula kemungkinan konten tersebut didistribusikan lebih luas. Pola ini menciptakan hubungan timbal balik antara pengguna dan algoritma, di mana tindakan pengguna menjadi input bagi sistem, dan output sistem kembali memengaruhi tindakan pengguna berikutnya.

Dalam literatur komunikasi politik digital, pola ini sering disebut sebagai *feedback loop* yang memperkuat visibilitas isu tertentu dalam ruang publik digital (Chadwick, 2017: 67; Kreiss, 2016: 103). Dalam situasi ini, jaringan komunikasi politik terbentuk sebagai proses yang terus bergerak dan saling memperkuat, bukan sebagai struktur yang statis. Relasi antar

actant menghubungkan elemen-elemen dalam jaringan, kemudian secara aktif membentuk arah dan dinamika komunikasi politik itu sendiri.

C. *Translation*: Transformasi Makna dalam Sirkulasi Informasi Politik

Tahap selanjutnya adalah menganalisis proses *translation*, yaitu bagaimana makna politik berubah dalam jaringan komunikasi digital. Temuan penelitian menunjukkan bahwa informasi politik mengalami transformasi signifikan ketika beredar dalam platform digital. Konten yang awalnya bersifat informatif sering kali diubah menjadi lebih emosional, provokatif, atau simplistik agar sesuai dengan logika distribusi platform.

Dalam penelitian ini, proses *translation* diamati melalui peredaran isu Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di platform X pada periode Februari–Maret 2026. Kasus ini dipilih karena menunjukkan perubahan makna yang dapat ditelusuri secara empiris melalui rangkaian unggahan, respons pengguna, serta peningkatan interaksi yang terjadi dalam waktu relatif singkat. Data observasi memperlihatkan bahwa informasi yang awalnya disampaikan dalam format berita kebijakan oleh akun Bloomberg kemudian mengalami transformasi ketika didistribusikan ulang oleh akun lain dengan narasi yang berbeda.

Dalam observasi terhadap konten viral, ditemukan bahwa isu politik yang mengandung konflik atau emosi cenderung memperoleh visibilitas yang lebih tinggi. Istilah viral digunakan untuk merujuk pada konten yang memperoleh tingkat keterlibatan (*engagement*) dan jangkauan (*reach*) yang jauh lebih tinggi dibandingkan interaksi normal pada isu yang sama dalam periode pengamatan. Indikator yang digunakan meliputi jumlah tayangan (*views*), *retweet*, *likes*, komentar, serta intensitas distribusi ulang oleh akun lain. Berdasarkan kriteria tersebut, unggahan terkait Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diamati dalam penelitian ini dapat dikategorikan sebagai konten viral karena memperoleh ratusan ribu tayangan serta ribuan interaksi hanya dalam beberapa hari setelah dipublikasikan. Kasus MBG dipilih

karena menunjukkan karakteristik konten viral dalam periode observasi. Unggahan Bloomberg pada 11 Maret 2026 memperoleh sekitar 376,5 ribu tayangan, 281 retweet, dan 799 likes, sedangkan unggahan lanjutan dari akun influencer yang mendistribusikan ulang informasi tersebut memperoleh sekitar 333 ribu tayangan, 4 ribu retweet, dan 10 ribu likes hanya dalam beberapa hari. Tingginya tingkat keterlibatan ini menunjukkan bahwa isu tersebut memperoleh perhatian publik yang luas dan mengalami sirkulasi intensif dalam jaringan platform X. Oleh karena itu, kasus ini digunakan untuk menelusuri bagaimana proses *translation* berlangsung ketika suatu informasi politik bergerak dari format berita kebijakan menuju berbagai interpretasi dan narasi yang diproduksi oleh pengguna lain.

Hal ini menunjukkan bahwa algoritma berperan dalam “menerjemahkan” konten politik ke dalam format yang lebih menarik bagi pengguna. Dengan kata lain, proses *translation* dilakukan oleh sistem algoritmik yang mengubah bentuk dan makna pesan politik. Akibatnya, realitas politik yang muncul di ruang digital merupakan hasil dari proses transformasi yang antara aktor manusia dan non-manusia (algoritma).

Dalam memperjelas proses *translation*, penulis melakukan observasi pada isu viral yang ramai diperbincangkan publik Indonesia mengenai program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada periode Februari hingga Maret 2026 menjelang bulan Ramadhan. Salah satu titik awal sirkulasi informasi berasal dari unggahan akun resmi Bloomberg pada 11 Maret 2026 yang membagikan tautan berita terkait pengajuan *judicial review* (mekanisme pengujian undang-undang terhadap konstitusi yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi untuk menilai apakah suatu kebijakan atau regulasi bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar negara) yang diajukan oleh koalisi masyarakat sipil terhadap program tersebut. Dalam isi berita tersebut dijelaskan bahwa program MBG menghadapi tantangan konstitusional karena dianggap memberikan kewenangan terlalu luas dalam pengelolaan dana publik serta berpotensi mengganggu prioritas fiskal negara (lihat gambar 5). Pada tahap ini, informasi politik disajikan dalam format jurnalistik yang relatif formal, berbasis data, dan

berorientasi pada aspek kebijakan publik. Namun, ketika informasi tersebut masuk ke dalam ekosistem platform digital, terutama di X, makna awalnya mulai mengalami pergeseran melalui intervensi aktor lain dalam jaringan.

Gambar 5. Unggahan Akun Bloomberg



Sumber: Postingan Bloomberg @bussines di Platform X pada 11 Maret 2026 diakses ulang oleh peneliti pada 28 Maret 2026

Transformasi tersebut menjadi semakin jelas ketika sebuah akun *influencer* politik (pendengung) me-*retweet* unggahan tersebut dengan menambahkan narasi: *“Hi, Bloomberg. These are the menus produced by that \$20 billion initiative. Please, take a look. Thanks.”* Narasi tambahan ini memasukkan unsur sindiran, kritik implisit, sekaligus framing visual melalui penyertaan gambar menu makanan, yang secara tidak langsung menggeser fokus dari isu kebijakan fiskal ke representasi konkret hasil program di lapangan (lihat gambar 6). Dalam kurun waktu lima hari, unggahan ini memperoleh sekitar 333 ribu tayangan, 4 ribu *retweet*, 10 ribu *likes*, dan puluhan komentar, menunjukkan

tingginya resonansi publik terhadap narasi yang telah ditransformasikan tersebut.

Gambar 6. Unggahan Akun *Influencer*



Sumber: Postingan akun MBG Jelek @menuembegejelek di Platform X pada 11 Maret 2026 diakses ulang oleh peneliti pada 28 Maret 2026

Di sinilah proses *translation* dalam ANT bekerja secara nyata, informasi yang awalnya disitrususikan oleh satu akun, kemudian diubah bentuk, konteks, dan maknanya melalui interaksi antar *actant* (akun atau pengguna) (Callon, 1986: 203; Latour, 2005: 108). Algoritma platform kemudian memperkuat versi narasi yang lebih emosional dan visual ini karena dianggap lebih menarik secara *engagement*, sebagaimana dijelaskan oleh Gillespie (2014: 168) tentang algoritma sebagai penentu relevansi publik, serta Zeynep Tufekci (2015: 208) yang menunjukkan bahwa sistem rekomendasi cenderung mengamplifikasi konten

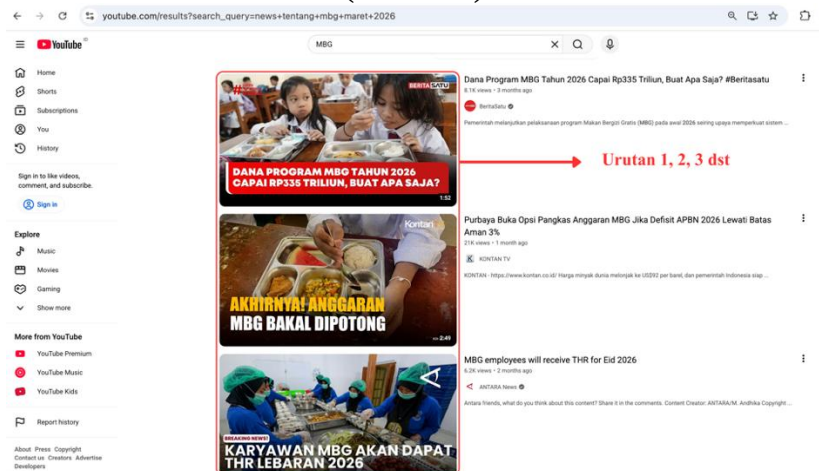
yang memicu reaksi kuat. Temuan ini menegaskan bahwa makna politik dalam ruang digital tidak bersifat tetap, melainkan terus dinegosiasikan dan ditransformasikan melalui relasi antara pengguna, konten, dan algoritma.

D. *Mediator vs Intermediary*: Peran Algoritma dalam Mengubah Makna

Dalam ANT, penting untuk membedakan antara *intermediary* (yang hanya menyampaikan) dan *mediator* (yang mengubah makna) (Latour, 2005). Temuan penelitian menunjukkan bahwa algoritma berfungsi sebagai mediator, bukan sekadar *intermediary*. Hal ini terlihat dari bagaimana algoritma tidak hanya menyalurkan konten, tetapi juga menentukan bagaimana konten tersebut ditampilkan kepada pengguna.

Pada platform YouTube, misalnya, sistem rekomendasi tidak hanya menampilkan video, namun menyusunnya dalam urutan konten yang mempengaruhi interpretasi pengguna terhadap isu politik (lihat gambar 7).

Gambar 7. Sistem Rekomendasi Urutan Konten Youtube
(Isu MBG)



Sumber: Urutan Isu MBG pada Platform Youtube
diakses oleh peneliti pada 29 Maret 2026

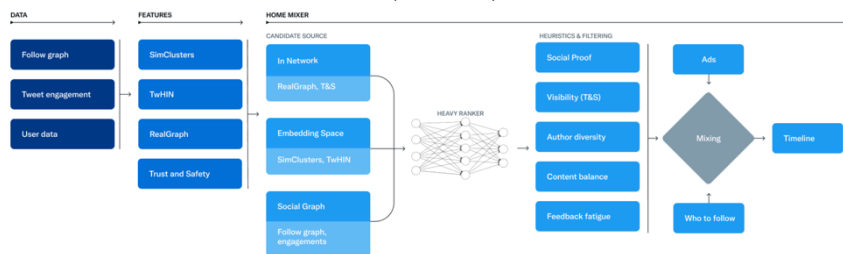
Hal ini menunjukkan bahwa algoritma memiliki peran aktif dalam membentuk makna, karena ia menentukan konteks di mana informasi diterima oleh pengguna. Oleh karena itu, berdasarkan temuan ini dapat disimpulkan bahwa algoritma berperan sebagai mediator yang mentransformasikan komunikasi politik tidak sebatas menyalurkannya (*intermediary*).

E. *Black-boxing*: Ketertutupan Sistem Algoritmik

Tahap berikutnya adalah menganalisis fenomena *black-boxing*, yaitu kondisi di mana proses internal suatu sistem tidak dapat diakses atau dipahami secara langsung. Temuan penelitian menunjukkan bahwa algoritma platform bekerja sebagai “kotak hitam” yang sulit dipahami oleh pengguna. Meskipun platform menyediakan penjelasan umum tentang cara kerja algoritma, detail operasionalnya tetap tidak transparan.

Sebagai contoh, kebijakan transparansi X (Twitter) dalam kebijakan platform pada laman “*Twitter’s Recommendation Algorithm*” (Twitter Engineering, 2023) menjelaskan bahwa algoritma mempertimbangkan berbagai faktor dalam menentukan visibilitas konten, tetapi tidak menjelaskan secara rinci bagaimana faktor tersebut diolah. Dokumen tersebut menyebutkan bahwa sistem rekomendasi dibangun dari model yang mengekstraksi informasi dari data tweet, pengguna, dan interaksi untuk memprediksi kemungkinan keterlibatan pengguna, kemudian melalui tahapan pemilihan kandidat, pemeringkatan menggunakan *machine learning*, serta penerapan filter tambahan sebelum konten ditampilkan pada linimasa “For You” (lihat gambar 8). Penjelasan ini menunjukkan bahwa distribusi konten tidak ditentukan oleh satu variabel tunggal, melainkan melalui pipeline komputasional yang terdiri dari berbagai layanan yang saling terhubung dan ini semua bersifat kompleks dan sukar dipahami oleh para pengguna platform.

Gambar 8. Arsitektur Mesin Penyusunan Beranda pada Platform X (Twitter)

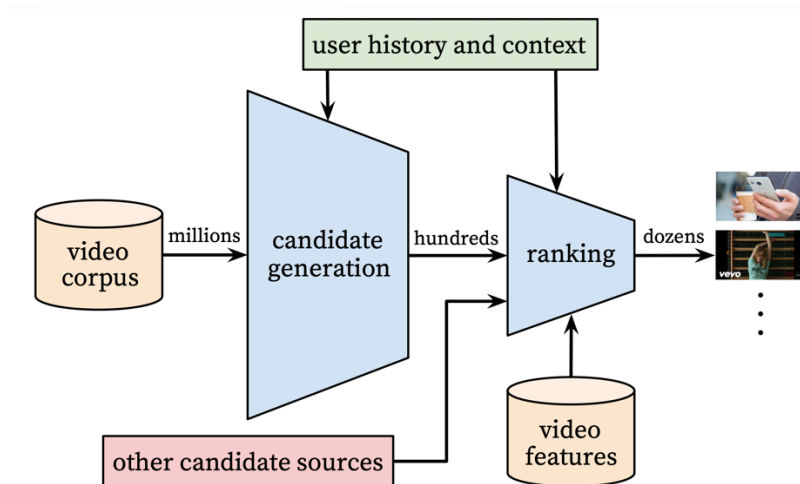


Sumber: https://blog.x.com/engineering/en_us/topics/open-source/2023/twitter-recommendation-algorithm?
diakses pada 29 Maret 2026

Kompleksitas serupa juga terlihat pada kebijakan YouTube yang menjelaskan bahwa sistem rekomendasi bekerja dengan menyaring sejumlah besar video menggunakan berbagai sinyal seperti riwayat tontonan, klik, durasi menonton, dan interaksi pengguna sebelum menentukan video yang muncul pada beranda dan rekomendasi. Dokumen resmi YouTube menyebutkan bahwa sistem rekomendasi menggunakan model pembelajaran mesin untuk memprediksi video mana yang paling mungkin relevan bagi pengguna berdasarkan perilaku sebelumnya, sehingga distribusi konten merupakan hasil dari proses komputasional bertingkat yang tidak sepenuhnya terlihat oleh pengguna (YouTube, 2023). Studi Covington, Adams, dan Sargin (2016) yang menunjukkan bahwa rekomendasi YouTube bekerja melalui arsitektur *deep neural network* bertingkat yang memisahkan proses *candidate generation* dan *ranking*, di mana sistem terlebih dahulu menyaring jutaan video menjadi kandidat terbatas, lalu memeringkatnya berdasarkan probabilitas interaksi pengguna (lihat gambar 9). Temuan tersebut memperlihatkan bahwa visibilitas konten ditentukan melalui pipeline komputasional yang

kompleks, sementara logika pembobotan variabel dan proses penilaian model tetap berada dalam sistem algoritmik yang tidak sepenuhnya transparan bagi pengguna.

Gambar 9. Model Penyaringan Bertingkat dalam Sistem Rekomendasi Video YouTube



Sumber: Covington, P., Adams, J., & Sargin, E. (2016: 192).

Kondisi ini menunjukkan bahwa algoritma beroperasi sebagai mekanisme yang menyaring, memeringkat, dan mendistribusikan informasi melalui proses komputasional yang tidak sepenuhnya terbuka bagi pengguna. Transparansi yang disediakan platform hanya menggambarkan tahapan umum, sementara logika pembobotan, hubungan antar variabel, dan keputusan akhir tetap berada di dalam sistem yang tertutup. Akibatnya, pengguna memahami kerja algoritma melalui hasil yang muncul pada linimasa, seperti konten yang menjadi viral, isu yang memperoleh visibilitas tinggi, atau diskursus yang berkembang dalam ruang publik digital. Dalam situasi ini, algoritma berperan sebagai struktur yang mengatur peluang keterlihatan informasi sekaligus membentuk arah percakapan politik. Dengan menentukan konten mana yang diperluas dan mana yang tenggelam, algoritma berfungsi sebagai mekanisme

seleksi yang mempengaruhi pembentukan agenda, dinamika perdebatan, dan posisi aktor dalam jaringan komunikasi politik digital.

F. Stabilisasi: Pembentukan Realitas Politik dalam Ruang Digital

Tahap stabilisasi dalam perspektif ANT merujuk pada kondisi ketika jaringan yang sebelumnya bersifat dinamis mulai mengeras dan menghasilkan narasi yang relatif dominan dalam ruang publik (Callon, 1986; Latour, 2005; Law, 2009). Pada tataran ini stabilisasi terlihat ketika jaringan yang terbentuk melalui interaksi berbagai aktor mulai menghasilkan lebih dari satu narasi yang memperoleh visibilitas tinggi secara bersamaan.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa diskursus politik digital tidak hanya berpusat pada satu isu, tetapi berkembang melalui beberapa isu yang saling beririsan. Selain isu geopolitik pasca penyerangan Israel dan Amerika Serikat, observasi juga menemukan munculnya isu MBG yang turut memperoleh perhatian dalam percakapan publik digital. Kedua isu tersebut beredar dalam waktu yang relatif berdekatan dan diproses melalui mekanisme distribusi yang sama, yakni interaksi pengguna, respons *influencer*, serta penguatan algoritmik pada platform X. Kondisi ini menunjukkan bahwa stabilisasi tidak selalu menghasilkan satu narasi tunggal, tetapi dapat membentuk beberapa pusat perhatian yang berjalan secara paralel.

Algoritma platform berperan dalam mempertahankan visibilitas kedua isu tersebut melalui rekomendasi berulang. Konten terkait geopolitik internasional muncul dalam *trending topic* dan diskusi publik, sementara isu MBG berkembang melalui video tanggapan, komentar pengguna, serta peliputan ulang oleh media. Interaksi yang terus meningkat pada masing-masing isu menghasilkan data keterlibatan yang memperkuat distribusi konten. Akibatnya, pengguna terpapar secara berulang pada kedua topik tersebut, sehingga keduanya memperoleh posisi sebagai diskursus politik yang relevan dalam ruang digital. Situasi ini menunjukkan bahwa stabilisasi realitas politik terjadi

melalui kompetisi visibilitas antar isu yang sama-sama diperkuat oleh algoritma.

Stabilisasi juga terlihat dari pola percakapan yang mulai mengkristal pada masing-masing isu. Pada diskursus geopolitik, pengguna membahas konflik internasional dan implikasinya terhadap Indonesia. Sementara pada isu MBG, percakapan berkembang pada aspek kebijakan domestik dan dampaknya terhadap publik. Kedua diskursus tersebut bergerak dalam jaringan yang berbeda, namun tetap berada dalam ekosistem platform yang sama. *Influencer*, media, dan pengguna berperan dalam memperluas masing-masing narasi, sementara algoritma menjaga keberlanjutan visibilitasnya. Dengan kata lain, realitas politik dalam ruang digital terbentuk melalui stabilisasi beberapa isu yang memperoleh penguatan simultan dalam jaringan komunikasi yang sama.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa komunikasi politik telah bergeser dari model yang berpusat pada media massa menuju ekosistem digital yang bekerja melalui logika algoritmik. Perubahan tersebut mengubah cara informasi politik diproduksi, didistribusikan, dan diterima oleh publik. Dalam kondisi ini, komunikasi politik terbentuk melalui hubungan antara berbagai aktor yang saling terhubung dalam jaringan digital.

Berdasarkan perspektif Actor-Network Theory (ANT), penelitian ini menemukan bahwa algoritma menempati posisi penting dalam jaringan komunikasi politik digital. Algoritma berperan dalam menentukan visibilitas informasi, mengatur aliran konten, dan memengaruhi interaksi antarpengguna. Temuan ini menunjukkan bahwa algoritma merupakan *actant* yang ikut membentuk proses komunikasi politik bersama pengguna, platform digital, konten, dan data.

Hasil analisis juga memperlihatkan bahwa informasi politik mengalami perubahan makna selama proses peredarannya di ruang digital. Konten yang awalnya bersifat informatif cenderung berkembang menjadi lebih emosional, sederhana, dan mudah disebarluaskan sesuai dengan karakteristik platform

digital. Pada saat yang sama, mekanisme kerja algoritma berlangsung dalam sistem yang tertutup sehingga sulit dipahami oleh pengguna. Kondisi tersebut berpengaruh terhadap pembentukan perhatian publik dan perkembangan isu politik di ruang digital.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa perubahan komunikasi politik pada era digital bukan semata persoalan penggunaan teknologi baru. Perubahan tersebut menunjukkan adanya rekonfigurasi ekosistem komunikasi politik yang menempatkan algoritma sebagai bagian penting dalam pembentukan realitas politik. Temuan ini memperkuat argumentasi bahwa algoritma memiliki peran aktif dalam produksi, distribusi, dan artikulasi makna politik di lingkungan digital.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan kajian komunikasi politik yang lebih memperhatikan hubungan antara aktor manusia dan non-manusia dalam ruang digital. Penggunaan metode pemetaan jaringan digital, analisis sirkulasi informasi, dan audit algoritma dapat membantu menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai dinamika komunikasi politik kontemporer.

Dari sisi praktis, diperlukan peningkatan transparansi algoritmik pada platform digital agar proses penyebaran informasi politik dapat dipahami secara lebih terbuka. Literasi algoritmik masyarakat juga perlu diperkuat sehingga publik memiliki kemampuan untuk memahami cara kerja platform dan lebih kritis dalam menilai informasi politik yang diterima. Selain itu, pengembangan kebijakan yang responsif terhadap pengaruh algoritma menjadi penting untuk mendukung kualitas informasi dan kehidupan demokrasi di era digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Berger, Peter Ludwig, & Luckmann, Thomas. (2011). *The social construction of reality: A treatise in the sociology of knowledge*. Penguin Books.
- Bloomberg News. (2026, March 11). *Prabowo's free meals plan draws court challenge by civil groups*. Bloomberg.
<https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-03-11/prabowo-s-free-meals-plan-draws-court-challenge-by-civil-groups>
- Borgatti, Stephen P., Mehra, Ajay, Brass, Daniel J., & Labianca, Giuseppe. (2009). Network analysis in the social sciences. *Science*, 323(5916), 892–895.
<https://doi.org/10.1126/science.1165821>
- Bucher, Taina. (2018). *If...then: Algorithmic power and politics*. Oxford University Press.
- Burgess, Jean, & Green, Joshua. (2018). *YouTube: Online video and participatory culture* (2nd ed.). Polity Press.
- Callon, Michel. (1986). Some elements of a sociology of translation: Domestication of the scallops and the fishermen of St. Brieuc Bay. In John Law (Ed.), *Power, action and belief: A new sociology of knowledge?* (pp. 196–223). Routledge.
- Callon, Michel. (2001). Actor network theory. In Neil J. Smelser & Paul B. Baltes (Eds.), *International encyclopedia of the social & behavioral sciences*. Elsevier.
- Chadwick, Andrew. (2017). *The hybrid media system: Politics and power* (2nd ed.). Oxford University Press.
- Couldry, Nick, & Hepp, Andreas. (2017). *The mediated construction of reality*. Polity Press.
- Covington, Paul, Adams, Jay, & Sargin, Emre. (2016). Deep neural networks for YouTube recommendations. In *Proceedings of the 10th ACM Conference on Recommender Systems* (pp. 191–198). ACM.
<https://doi.org/10.1145/2959100.2959190>

- Entman, Robert Matthew. (1993). Framing: Toward clarification of a fractured paradigm. *Journal of Communication*, 43(4), 51–58. <https://doi.org/10.1111/j.1460-2466.1993.tb01304.x>
- Gillespie, Tarleton. (2014). The relevance of algorithms. In Tarleton Gillespie, Pablo J. Boczkowski, & Kirsten A. Foot (Eds.), *Media technologies: Essays on communication, materiality, and society* (pp. 167–194). MIT Press.
- Habermas, Jürgen. (2006). Political communication in media society: Does democracy still enjoy an epistemic dimension? *Communication Theory*, 16(4), 411–426. <https://doi.org/10.1111/j.1468-2885.2006.00280.x>
- Jenkins, Henry. (2006). *Convergence culture: Where old and new media collide*. New York University Press.
- Klinger, Ulrike, & Svensson, Jakob. (2015). The emergence of network media logic in political communication. *New Media & Society*, 17(8), 1241–1257. <https://doi.org/10.1177/1461444814522952>
- Kreiss, Daniel. (2016). *Prototype politics: Technology-intensive campaigning and the data of democracy*. Oxford University Press.
- Latour, Bruno. (2005). *Reassembling the social: An introduction to actor-network-theory*. Oxford University Press.
- Law, John. (1992). Notes on the theory of the actor-network: Ordering, strategy, and heterogeneity. *Systems Practice*, 5(4), 379–393.
- Law, John. (2009). Actor network theory and material semiotics. In Bryan S. Turner (Ed.), *The new Blackwell companion to social theory* (pp. 141–158). Wiley-Blackwell.
- Lim, M. (2017). Freedom to hate: social media, algorithmic enclaves, and the rise of tribal nationalism in Indonesia. *Critical Asian Studies*, 49(3), 411–427. <https://doi.org/10.1080/14672715.2017.1341188>
- McCombs, Maxwell Eugene, & Shaw, Donald Lewis. (1972). The agenda-setting function of mass media. *Public Opinion Quarterly*, 36(2), 176–187. <https://doi.org/10.1086/267990>
- McNair, Brian. (2017). *An introduction to political communication* (6th ed.). Routledge.

- Napoli, Philip M. (2014). Automated media: An institutional theory perspective on algorithmic media production and consumption. *Communication Theory*, 24(3), 340–360. <https://doi.org/10.1111/comt.12039>
- Napoli, Philip M. (2019). *Social media and the public interest: Media regulation in the disinformation age*. Columbia University Press.
- Ohme, J., Araujo, T., Boeschoten, L., Freelon, D., Ram, N., Reeves, B. B., & Robinson, T. N. (2024). Digital Trace Data Collection for Social Media Effects Research: APIs, Data Donation, and (Screen) Tracking. *Communication Methods and Measures*, 18(2), 124–141. <https://doi.org/10.1080/19312458.2023.2181319>
- Pariser, Eli. (2011). *The filter bubble: What the internet is hiding from you*. Penguin Press.
- Srnicek, Nick. (2017). *Platform capitalism*. Polity Press.
- Sunstein, Cass Robert. (2001). *Republic.com*. Princeton University Press.
- Swan, J., & Haberman, M. (2026, March 13). *Jared Kushner solicits funds for his firm while working as Mideast envoy*. The New York Times. <https://www.nytimes.com/2026/03/13/business/jared-kushner-affinity-mideast-funds.html>
- Tufekci, Zeynep. (2015). Algorithmic harms beyond Facebook and Google: Emergent challenges of computational agency. *Colorado Technology Law Journal*, 13, 203–218.
- Tufekci, Zeynep. (2017). *Twitter and tear gas: The power and fragility of networked protest*. Yale University Press.
- van Dijck, José, Poell, Thomas, & de Waal, Martijn. (2018). *The platform society: Public values in a connective world*. Oxford University Press.
- YouTube. (2023). *YouTube recommendation system overview*. YouTube Official Documentation.
- Twitter Engineering. (2023). *Twitter's recommendation algorithm*. Twitter Engineering Blog.

Sumber Unggahan Media Sosial

Postingan @Dinnopattidjalal di Platform X pada 18 Maret 2026
diakses ulang oleh peneliti pada 28 Maret 2026

<https://x.com/dinopattidjalal/status/2034077994718007442>

Postingan akun MBG Jelek @menuembegejelek di Platform X
pada 11 Maret 2026 diakses ulang oleh peneliti pada 28
Maret 2026

<https://x.com/menuembegejelek/status/2031641870330376505>